



Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah

Irfan Hamdani¹; Nugia Sri Nesta²; Junita Rahmawati³; Faisal Hidayat⁴
Ekonomi Islam, FEBI, Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

E-mail: nugiasri@gmail.com¹; junitarahmawati219@gmail.com²;
irfanhamdani072@gmail.com³; faisalhidayat@uinbukittinggi.ac.id⁴

Abstract: *Government expenditure is a component of fiscal policy, which is the action taken by the government to control how the economy develops by deciding how much money will be available for spending and revenue each year, as stated in the Budget revenue document. State Budget and Expenditures (APBN). In accordance with the unitary principle that regional government cannot be separated from the central government, on that basis, the independence of a region in managing its household affairs does not mean that each regional government must be able to finance all expenditures with its own Regional Original Revenue (PAD). This budget strategy aims to stabilize production levels, job prospects, and prices while encouraging economic expansion. Government expenditure and GRDP, or economic growth, are closely related because development spending is meant to support the role of development agencies and will result in the production of goods that are essential for advancing economic progress. The APBD, which includes income, expenditure and expenditure financing at the provincial/regional/city level, reflects regional government spending. Spending by the government has grown in tandem with tax revenues. For direct government expenditure display and exposure, expenditures directly related to programs or activities are bundled together as technical newspaper expenditures, while other expenditures are not. The regional revenue and expenditure budget, which includes revenue, spending and financing, reflects regional government expenditure at the provincial/district/city level. The difference between financing expenditures and expenditures is that financing expenditures involve spending money from the regional general treasury which will eventually be reimbursed, whereas expenditures involve spending money from the state/regional general treasury which will not be replaced.*

Keywords: *Government Expenditure, Regional Development*

Abstrak

Dalam kebijakan fiskal terdapat salah satu komponen yakni pengeluaran pemerintah, yang merupakan tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan bagaimana ekonomi berkembang dengan memutuskan berapa banyak uang yang akan tersedia untuk pengeluaran dan pendapatan setiap tahun, sebagaimana disebutkan dalam dokumen Anggaran pendapatan. Anggaran dan Belanja Negara (APBN). Sesuai dengan prinsip kesatuan bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipisahkan dari pemerintah pusat, atas dasar itu, kemandirian suatu daerah dalam mengelola urusan rumah tangganya tidak diartikan bahwa setiap pemerintah daerah harus mampu membiayai seluruh pengeluaran dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sendiri. Strategi anggaran ini bertujuan untuk menstabilkan tingkat produksi, prospek kerja, dan harga sambil mendorong ekspansi ekonomi. Belanja pemerintah dan PDRB, atau pertumbuhan ekonomi, terkait erat karena belanja pembangunan dimaksudkan untuk mendukung peran lembaga pembangunan dan akan menghasilkan produksi barang-barang yang penting untuk memajukan kemajuan ekonomi. APBD yang meliputi pembiayaan pemasukan, belanja, dan belanja di tingkat provinsi/daerah/kota mencerminkan belanja pemerintah daerah. Pengeluaran oleh pemerintah telah tumbuh seiring dengan pendapatan pajak. Untuk tampilan dan pemaparan pengeluaran pemerintah langsung, pengeluaran yang terkait langsung dengan program atau kegiatan dibundel bersama sebagai pengeluaran surat kabar teknis, sementara pengeluaran lainnya tidak. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang meliputi penerimaan, belanja, dan pembiayaan, mencerminkan belanja pemerintah daerah di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Perbedaan antara pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran adalah bahwa pengeluaran pembiayaan melibatkan pengeluaran uang dari kas umum daerah yang pada akhirnya akan diganti, sedangkan pengeluaran melibatkan pengeluaran uang dari kas umum negara / daerah yang tidak akan diganti.

Kata Kunci: Pengeluaran Pemerintah, Pembangunan Daerah

LATAR BELAKANG

Proses perbaikan berkelanjutan dalam suatu masyarakat atau sistem sosial secara keseluruhan untuk menuju kehidupan yang lebih baik dimana dalam proses pembangunan ekonomi itu sendiri memiliki tujuan yakni untuk meningkatkan standar taraf hidup masyarakat serta untuk meningkatkan kesejahteraan dan martabat masyarakat, termasuk dalam hal ini peningkatan kebutuhan dasar yang berbeda-beda, standar hidup yang lebih tinggi dan pilihan sosial ekonomi yang lebih banyak untuk masyarakat ini merupakan dasar dari pembangunan ekonomi.(Antonius Y,dkk,2018) Dalam hal meningkatkan tingkat kesejahteraan rakyat bukan hanya kewajiban pemerintah saja, ialah tanggung jawab semua aspek masyarakat untuk meningkatkan derajat kesejahteraan manusia, tugas ini melampaui tugas pemerintah. Karena itu, pemerintah harus mampu mendukung, meningkatkan, dan memungkinkan semua aspek masyarakat terkhususnya bidang usaha untuk berkontribusi lebih besar lagi dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Namun demikian, cita-cita ekonomi yang tinggi, adil dan merata akan dapat dicapai dan diraih dengan baik dan lebih cepat.

Peran yang sangat penting dalam suatu sistem ekonomi yakni dimana pemerintah memiliki hak mutlak berpartisipasi dalam setiap kegiatan ekonomi, dimana pemerintah tidak hanya mengalokasikan barang tetapi juga ikut dalam hal mengelola barang dan jasa, meningkatkan penjualan internasional, stabilitas ekonomi, dan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi. Adam Smith menjabarkan bahwa pemerintah memiliki tiga fungsi, yakni; (1) fungsi alokasi adalah tugas pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya dan mengoptimalkan pemakaiannya. (2) fungsi distribusi, adalah tugas pemerintah untuk mengatur distribusi pendapatan dan perusahaan untuk berkembang. (3) fungsi Stabilisasi adalah bagaimana pemerintah untuk meningkatkan kesempatan kerja serta stabilitas harga barang-barang kebutuhan ekonomi yang maju.(Ranifial Anugra,2016)

Dalam kebijakan fiscal terdapat salah satu komponen yakni pengeluaran pemerintah, yang dimana tindakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengendalikan bagaimana ekonomi berkembang dengan memutuskan berapa banyak uang yang akan tersedia untuk pengeluaran dan pendapatan setiap tahun, sebagaimana disebutkan dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk anggaran dan dalam skala nasional. Sedangkan anggaran (APBD) untuk tingkat daerah. Di negara berkembang dari tahun ke tahun pengeluaran pemerintah cenderung mengalami peningkatan, karena pemerintah di negara berkembang memiliki fungsi agent of development dan sejalan dengan meningkatnya ekonomi dalam negara.(Harry A. P. Sitaniapessy,2013)

Salah satu unsur pengeluaran pemerintah yakni dalam hal penggunaan sumber daya ekonomi baik itu penggunaan secara langsung maupun itu penggunaan sumber daya ekonomi secara tidak langsung. Kebebasan suatu daerah dalam menangani urusan dalam negerinya tidak dipahami berarti bahwa setiap pemerintah daerah harus mampu membiayai semua pengeluaran dengan pendapatan asli daerah sejalan dengan konsep kesatuan bahwa pemerintah daerah terpisah dari pemerintah pusat atas premis tersebut. (PAD), dan memantau pemberian otonomi kepada daerah dalam rangka mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri dalam rangka meningkatkan kegunaan dan kebermanfaatannya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka mutlak diperlukan upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mencegah pelaksanaan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Untuk memperdebatkan pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan daerah, tulisan ini akan melakukannya.

KAJIAN TEORITIS

A. Teori Pengeluaran Pemerintah

Strategi pemerintah dijelaskan oleh pengeluarannya. Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran yang harus ditanggung pemerintah untuk menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan untuk perolehan produk dan jasa. Teori makro dan teori mikro adalah dua kategori di mana teori pengeluaran pemerintah dapat dibagi. (Ridwan, dkk, 2021)

1. Teori Makro

Ukuran ruang lingkup operasi pemerintah yang didanai oleh pengeluaran pemerintah dapat dilakukan dengan menggunakan pengeluaran pemerintah yang sebenarnya. Pengeluaran publik meningkat karena operasi pemerintah menjadi lebih luas dan luas. Model pertumbuhan pemerintah adalah salah satu dari banyak model yang dibuat oleh ekonomi untuk teori makro pengeluaran publik. Rostow & Musgrave menciptakan model yang mengkaitkan perkembangan pengeluaran pemerintah ke fase awal, menengah, dan lanjutan dari pertumbuhan ekonomi. (Anugra, Marwa, and Imelda, 2018) Menurut teori ekonomi makro, ada tiga bagian utama dari pengeluaran pemerintah yang termasuk dalam kategori berikut:

- a. Pengeluaran oleh pemerintah untuk produk dan layanan.

- b. Kompensasi untuk pegawai pemerintah. Fluktuasi gaji karyawan berdampak pada proses ekonomi makro, di mana mereka secara tangensial akan mempengaruhi jumlah permintaan.
- c. Transfer payment pengeluaran oleh pemerintah. Penyaluran sumbangan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah seperti penyaluran bantuan untuk pembayaran terhadap pembelian suatu barang dan jasa, contohnya pembayaran subsidi, pembayaran uang pensiunan dan pembayaran suatu bunga pinjaman pemerintah terhadap masyarakat

2. Teori Mikro

Analisis aspek-aspek yang berkontribusi terhadap permintaan akan kepentingan bersama dan aspek-aspek yang berdampak pada aksesibilitasnya adalah tujuan..dari teori mikro mengenai pertumbuhan pengeluaran pemerintah. Kuantitas barang publik yang akan dijadwalkan di luar anggaran ditentukan oleh interaksi antara penawaran dan permintaan barang tersebut. Jumlah barang publik yang ditawarkan kemudian mengarah pada permintaan barang lainnya

Selanjutnya berikut beberapa teori mengenai yang pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh para tokoh yaitu :

1. Teori Adolf Wagner

Teori ini mengemukakan bahwa belanja publik dan aktivitas pemerintah meningkat dari hari ke hari. Kecenderungan ini, yang disebut hukum oleh Wagner. Meningkatnya keterlibatan pemerintah dalam suatu kegiatan dan kesehatan ekonomi masyarakat secara keseluruhan adalah inti dari teori Wegner. Wagner menunjukkan bahwa jika kekayaan per kapita ekonomi meningkat, pengeluaran pemerintah juga akan meningkat secara relatif. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kebutuhan pemerintah untuk mengendalikan hubungan yang berkembang di masyarakat, termasuk yang melibatkan hukum, pendidikan, rekreasi, dan budaya. Teori ini, atau teori yang melihat pemerintah sebagai orang yang bebas bertindak secara otonom dari orang lain, adalah dasar bagi teori Wagner. Wagner tidak menyediakan metode matematika, tetapi hukumnya menggambarkan

korelasi jangka panjang antara ukuran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran biasanya digunakan untuk mengukur pertumbuhan suatu negara, sedangkan produk domestik bruto biasanya digunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi. (PDB).(Akhmad Solikin,2018)

2. Teori Peacock dan Wiseman

Hipotesis yang dikemukakan oleh Peacock dan Wiseman didukung oleh penelitian tentang pengeluaran pemerintah. Terlepas dari kenyataan bahwa orang tidak suka membayar pajak dalam jumlah besar, pemerintah berusaha membiayai pengeluarannya yang terus meningkat dengan semakin bergantung pada pendapatan pajak. Dengan adanya peningkatan penerimaan pajak, maka sejalan dengan hal tersebut pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah juga akan ikut mengalami peningkatan. Dalam keadaan normal, peningkatan PDB mengakibatkan peningkatan pendapatan pemerintah dan karena itu juga meningkatkan pendapatan pemerintah dengan peningkatan belanja publik. Teori ini juga menjelaskan bahwa masyarakat memiliki tingkatan toleransi pajak, yaitu tingkat yang dapat dipahami orang jumlah pajak yang harus dibiayai pemerintah untuk belanja publik.(Aan Jaelani,2018)

3. Teori Colin Clark

Collin Clark menyampaikan teori mengenai batas-batas penting pajak. Meskipun anggaran untuk belanja pemerintah seimbang, kapasitas untuk tarif pajak dan pengeluaran ditaksir kurang dari 25% dari GNP. Dikatakan bahwa inflasi terjadi jika aktivitas sektor pemerintah, yang diukur dengan perpajakan dan pendapatan lainnya, melampaui 25% dari semua kegiatan ekonomi. Argumen yang dikemukakan adalah bahwa penurunan antusiasme kerja akan diakibatkan oleh pajak yang tinggi. Akibatnya, produktivitas secara alami akan menurun, yang akan menurunkan jumlah total.

B. Teori Pembangunan Daerah

Inti dari teori pembangunan regional berpusat di sekitar dua konsep: teori yang membahas variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di wilayah tertentu dan pembicaraan terkait tentang teknik untuk mempelajari ekonomi suatu wilayah. Dengan demikian, sejumlah hipotesis ada untuk menggambarkan pertumbuhan regional, termasuk:

1. Teori Ekonomi Neo Klasik

Karena tidak cukup menjelaskan aspek geografis yang penting, teori ekonomi neoklasik tidak memainkan peran penting dalam studi pertumbuhan regional (regional). Keseimbangan dan mobilitas variabel produksi adalah dua gagasan utama dalam pertumbuhan ekonomi regional yang ditawarkan oleh teori ini. Idennya adalah bahwa jika modal dapat bergerak bebas, ekonomi akan mencapai posisi keseimbangan alaminya. Akibatnya, uang akan berpindah dari daerah dengan upah tinggi ke daerah dengan upah rendah.

2. Teori Basis Ekonomi (Economic Base Theory)

Menurut teori basis ekonomi ini, keinginan untuk produk dan layanan dari luar wilayah adalah penentu utama pertumbuhan ekonomi di daerah tertentu. Pengembangan kekayaan dan lapangan kerja regional akan berasal dari perluasan bisnis yang dilakukan dengan cara memanfaatkan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk ekspor. Strategi pengembangan wilayah berdasarkan teori ini ialah penekanan pada pentingnya pendampingan kepada pelaku usaha yang memiliki pasar di dalam negeri maupun luar negeri, pelaksanaan aturan meliputi peminimalisiran hambatan dan pembatasan terhadap perusahaan berorientasi ekspor yang ada yang akan didirikan di daerah tersebut.

3. Teori Lokasi

Menurut statistik ekonomi daerah, tiga aspek lokasi, lokasi, dan lokasi berdampak pada pembangunan regional. Bisnis sering memilih situs yang memaksimalkan pengeluaran untuk menguranginya. kesempatan untuk menghubungi pasar. Situs yang ideal adalah di mana ada biaya terendah antara pasar dan bahan baku, sesuai dengan paradigma pertumbuhan industri lama.(R Didi Djadjuli,2018)

METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan teknik studi perpustakaan digunakan dalam penelitian ini. Dengan menggunakan metode deskriptif, penulis dapat mempelajari atau memahami fenomena serta mendeskripsikan dan menjelaskannya secara verbal dalam pengaturan tertentu menggunakan analisis kualitatif berdasarkan buku, jurnal, dan dokumen lain yang relevan dengan subjek penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi Pengeluaran Pemerintah

Semua pengeluaran yang digunakan untuk mendanai operasi pemerintah suatu negara dalam rangka melaksanakan tugasnya dan memastikan kesejahteraan warganya disebut sebagai pengeluaran pemerintah atau negara. Menurut Sukino, pengeluaran pemerintah adalah total pengeluaran yaitu Pengeluaran yang termasuk konsumsi dan investasi Pengeluaran pemerintah merupakan pengeluaran pemerintah atas barang modal, barang konsumsi dan jasa. Organisasi operasi pemerintah pusat dan daerah serta pelaksanaan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah keduanya dicapai melalui penggunaan pengeluaran negara dan kota. Distribusi kementerian atau entitas pemerintah pusat diperhitungkan saat menyesuaikan pengeluaran negara bagian dan kota per entitas.(Intan Safitri,2016) Pengeluaran pemerintah adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan dana yang digunakan oleh sektor publik untuk membeli produk dan layanan seperti jaminan sosial, perawatan kesehatan, dan pendidikan. Dengan bantuan pengeluaran publik, pemerintah dapat menciptakan atau memperoleh produk dan layanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan ekonominya. Kebijakan ekonomi yang dikenal sebagai kebijakan moneter mengontrol berapa banyak uang yang tersedia dalam suatu ekonomi dan seberapa cepat uang itu berkembang.

Penetapan besaran pendapatan dan belanja pemerintah setiap tahunnya, yang terwakili dalam dokumen APBN untuk APBN dan APBD atau daerah, merupakan langkah dalam upaya pemerintah mengendalikan arah perekonomian. Strategi anggaran ini bertujuan untuk menstabilkan tingkat produksi, prospek kerja, dan harga sambil mendorong ekspansi ekonomi. Belanja pemerintah dan PDRB, atau pertumbuhan ekonomi, terkait erat karena belanja pembangunan dimaksudkan untuk mendukung peran lembaga pembangunan dan akan menghasilkan produksi barang-barang yang penting untuk memajukan kemajuan ekonomi.(Juwandariah,dkk,2023)

Menurut Suparmoko, belanja negara atau pemerintah adalah pengeluaran /belanja pemerintah yang melibatkan jenis dan sifat pengeluaran yang diperlukan dalam segala bentuk pengadaan barang publik, alokasi produksi dan komoditas untuk konsumsi, peningkatan distribusi pendapatan, menjaga stabilitas nasional, stabilitas ekonomi dan percepatan perkembangan ekonomi yang ditujukan untuk pembentukan dan kesejahteraan masyarakat. Setiap tahun, pentingnya operasi pemerintah telah tumbuh di hampir semua sistem ekonomi. Peningkatan pengeluaran publik relatif

terhadap pendapatan nasional mencerminkan perluasan fungsi pemerintah. Pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebagai indikator besar kecilnya kegiatan yang didanai pemerintah belanja publik. Semakin besar dan semakin besar aktivitas pemerintah, semakin banyak pengeluaran pemerintah yang terlibat. (Sahya Anggara, 2016)

B. Jenis-Jenis Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah pusat, pengeluaran pemerintah provinsi serta pengeluaran pemerintah daerah bagian kabupaten/kota, termasuk kedalam jenis pengeluaran pemerintah yang dikelompokkan berdasarkan institusi atau organisasi. Sedangkan pengeluaran pemerintah berdasarkan sifat atau karakter terdiri dari pengeluaran investasi, penciptaan lapangan kerja, penghematan masa depan, dan pengeluaran yang tidak produktif. Berikut penjelasan macam-macam pengeluaran pemerintah berdasarkan institusi atau organisasi yaitu:

1. Pengeluaran Pemerintah Pusat

Dana yang terdapat di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang masuk dalam belanja pemerintah pusat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Anggaran negara membagi pengeluaran dan pengeluaran dana untuk pemerintah federal menjadi dua kelompok.

2. Pengeluaran Pemerintah Provinsi

Dana alokasi yang dikirimkan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah provinsi di muat dalam laporan yang namanya APBD, dalam laporan APBD juga memuat hasil dari penerimaan pajak yang dipungut dari masyarakat.

3. Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota

Ini digunakan dalam anggaran daerah kabupaten atau kota untuk pengeluaran dan distribusi pendapatan kepada masyarakat dan kelurahan.

Sedangkan berdasarkan karakternya, pengeluaran atau belanja pemerintah dibedakan menjadi 5, antara lain:

1. Pengeluaran/belanja untuk Investasi

belanja investasi merupakan belanja yang dilakukan untuk membuat ekonomi lebih kuat dan lebih tangguh di masa depan.

2. Investasi dalam Pembukaan Lapangan Kerja

Investasi dalam hal pembukaan lapangan pekerjaan bertujuan untuk lebih meningkatkan lagi jumlah lapangan pekerjaan, sehingga dapat mengurangi angka pengangguran di dalam suatu negara atau daerah.

3. Pengeluaran untuk kesejahteraan rakyat

Belanja untuk kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai tindakan yang secara langsung mempengaruhi kesejahteraan masyarakat atau membawa kebahagiaan mereka.

4. Biaya Terkait dengan Penghematan Di Masa Depan

Pendapatan yang di terima oleh pemerintah jika digunakan untuk masa sekarang akan memberikan dampak terhadap penurunannya pengeluaran pemerintah untuk masa depan kelak. Tetapi jika pendapatan pemerintah tidak digunakan untuk masa sekarang maka itu akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara.

5. Belanja Tidak Produktif

Belanja yang tidak produktif merupakan belanja yang tidak memberikan kontribusi secara langsung kepada rakyat, namun demikian dibutuhkan oleh pemerintah.

C. Aspek-Aspek Yang Mempengaruhi Pengeluaran Pemerintah

Aspek-aspek yang dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah ada beberapa bagian yaitu::

1. Perkiraan jumlah pendapatan yang akan dikumpulkan pemerintah

Penerimaan pajak yang diantisipasi merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi berapa banyak uang yang dikeluarkan pemerintah. Jumlah belanja pemerintah akan meningkat berbanding lurus dengan jumlah penerimaan pajak yang dikumpulkan. Tujuan ekonomi yang ingin dicapai pemerintah

2. Rencana ekonomi yang ingin dicapai pemerintah

Aspek selanjutnya yang dapat mempengaruhi pengeluaran pemerintah yakni tujuan atau rencana yang ingin di capai oleh pemerintah, karena pengeluaran pemerintah akan dapat mengatur suatu kegiatan yang telah direncanakan ke arah yang diinginkan oleh pemerintah..

3. Faktor keamanan dan politik

Untuk alasan politik dan keamanan, stabilitas suatu negara adalah salah satu tujuan terpenting saat menciptakan perkiraan pendapatan dan belanja negara. Untuk memantau keamanan dan stabilitas politik, pemerintah menyediakan dana. Hal ini memungkinkan ekonomi berfungsi dengan tujuan pertumbuhan.

4. Urbanisasi

Peningkatan populasi di wilayah metropolitan adalah hasil dari urbanisasi. Oleh karena itu, layanan metropolitan seperti infrastruktur untuk transit, komunikasi, keamanan, dan kesehatan lingkungan harus diberikan oleh pemerintah. Hal ini berpengaruh pada meningkatnya belanja negara secara bergantian.

5. Pertumbuhan pendapatan per kapita.

Pendapatan per kapita meningkat, maka semakin tinggi pengeluaran public yang dikeluarkan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa ketika pendapatan per kapita meningkat, persyaratan masyarakat berubah untuk mencerminkan pergeseran dalam struktur output dan tingkat kemajuan sosial. Jika sector pertanian telah mendominasi suatu struktur dalam produksi, maka dapat dikatakan bahwa pendapatan per kapita yang di peroleh oleh masyarakat masih tergolong rendah. Dan ini akan berdampak terhadap perkembangan atau kemajuan dalam masyarakat yang ikutan mengalami penurunan. Upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan tersebut yaitu dengan menyediakan kebutuhan akan barang sosial atau barang publik yang berupa barang atau jasa yang tidak memerlukan modal besar.(B Sobandi,2004)

D. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Penghidupan Ekonomi

1. Ukuran dan Susunan Hasil Nasional

Jika pemerintah tidak menemukan metode untuk mengubah susunan produk nasional, mungkin bangsa akan menerima lebih banyak atau membuat lebih banyak rokok, misalnya, pengeluaran nyata menyiratkan bahwa pemerintah menarik energi kreatif dari tujuan lain.

2. Besarnya Pendapatan Nasional (*National Income*) dan Kesempatan untuk Bekerja

Menurut Keynes, peningkatan pengeluaran pemerintah akan menurunkan pengangguran ketika ada pengangguran. Di sisi lain, jika pengeluaran pemerintah meningkat selama periode pekerjaan penuh atau lebih dari pekerjaan penuh, biaya akan meningkat. Perlu dicatat bahwa bagaimana biaya ini didanai berdampak pada yang lainnya.

3. Dapat Mempengaruhi Pembagian Penghasilan/Pendapatan

Pengeluaran pemerintah, seperti pengeluaran transfer (cadangan untuk yang kurang mampu) yang didanai oleh perpajakan, dapat mengubah cara pendapatan didistribusikan dengan mengurangi pendapatan pembayar pajak dan meningkatkan pendapatan orang yang kurang mampu dan menganggur. Oleh karena itu, peningkatan pengeluaran riil yang didukung oleh perpajakan menghasilkan pendapatan yang lebih rendah dari kontribusi pajak tetapi pendapatan yang lebih tinggi dari mereka yang tenaga kerjanya dipekerjakan oleh negara.

4. Pemanfaatan Pendapatan untuk Investasi, Tabungan, dan Konsumsi

Pengeluaran oleh pemerintah dapat mendongkrak pendapatan. Saat menganggur, menggunakan pendapatan untuk menabung hanya akan memperburuk pengangguran, bukan menciptakan lebih banyak prospek kerja. Namun, jika uang digunakan untuk investasi sementara ada pengangguran, itu bisa tumbuh. Peluang kerja dan, di sisi lain, investasi dalam situasi kesempatan kerja penuh akan menyebabkan harga yang lebih tinggi.

5. Naik Turunnya Harga

Dalam situasi pekerjaan yang lengkap, pengeluaran pemerintah akan mengakibatkan kenaikan harga, seperti inflasi upah. Pengeluaran pemerintah yang didanai secara inflasi akan menaikkan harga secara keseluruhan, sedangkan pemotongan pengeluaran yang tidak didukung oleh pengurangan pajak pada sumbernya menurunkan harga secara keseluruhan.

6. Neraca Pembayaran Luar Negeri

Jika harga naik, maka akan mengakibatkan peningkatan jumlah impor barang yang harganya terkait dengan kenaikan harga barang dalam negeri, maka biaya barang yang dipasok akan meningkat sehingga neraca

pembayaran luar negeri menunjukkan defisit, yaitu menggunakan devisa lebih banyak daripada memperoleh devisa.(Ujianto,2017)

E. Pengeluaran Daerah

Pengeluaran daerah adalah kemerosotan manfaat ekonomi dihitung selama periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar, atau penurunan aset yang mengakibatkan timbulnya hutang yang berdampak pada pengurangan ekuitas dana, selain yang berkaitan dengan distribusi kepada peserta ekuitas dana. Di dalam UU RI Nomor 33 Tahun 2004 mengatakan bahwa perimbangan suatu keuangan daerah diakui sebagai pemerosotan terhadap nilai guna kekayaan daerah dalam periode anggaran.

Pengeluaran daerah, sebagaimana dijelaskan oleh Indra Bastian dan Gatot Soepriyanto, adalah pengurangan manfaat ekonomi di masa depan atau kemungkinan layanan selama periode pelaporan dalam bentuk penarikan moneter atau konsumsi aset ekuitas bersih selain yang terkait dengan distribusi ke unit ekonomi itu sendiri.(Fadillah Amin,2019)

F. Klasifikasi Pengeluaran Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 terkait dengan pengelompokan belanja atau pengeluaran pemerintah daerah yang dimana telah diatur dalam keuangan daerah. Selanjutnya dijabarkan secara rinci lagi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 yang menjelaskan bagaimana pedoman dalam pengelolaan keuangan dalam suatu daerah. Dijelaskan bahwa klasifikasi belanja pemerintah daerah meliputi:

1. Pengelompokan/klasifikasi belanja daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan di bawah yurisdiksi provinsi, kabupaten, atau kota, yang meliputi pengeluaran baik untuk kegiatan diskresi maupun wajib.
2. Klasifikasi pengeluaran sesuai dengan tugas yang dimaksudkan untuk menyelaraskan dan mengintegrasikan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah pelayanan publik, hukum dan ketertiban, ekonomi, lingkungan hidup, perumahan dan prasarana umum, kesehatan, pariwisata dan budaya, pendidikan, dan jaminan sosial semuanya termasuk dalam kategorisasi pengeluaran ini. Fungsi pembelaan dan keagamaan tidak termasuk dalam Permendagri

Nomor 13 Tahun 2006, berbeda dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005, karena ini adalah urusan pemerintah pusat yang sepenuhnya diberlakukan olehnya dan tidak disentralisasikan.

3. Klasifikasi berdasarkan kategori pembelian yang mencakup belanja langsung dan sekunder. Belanja terkait langsung dengan kegiatan pemerintah (seperti pengeluaran gaji, pembelian barang, dan lain-lain). Sementara itu pengeluaran yang tidak terkait langsung dengan kegiatan pemerintah (seperti tunjangan karyawan bulanan).

G. Pengeluaran Daerah Dalam APBD

Berdasarkan Permendagri 13 Tahun 2006, yang kemudian merinci Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, pengeluaran pemerintah daerah dikelompokkan menjadi dua kategori: pengeluaran tidak langsung dan pengeluaran langsung. Biaya yang dianggarkan untuk pembelian langsung adalah yang terkait dengan pelaksanaan inisiatif dan tindakan tertentu. Divisi pembelian langsung dalam struktur APBD terdiri dari:

1. Belanja Pegawai

Untuk tujuan melaksanakan inisiatif dan kegiatan pemerintah daerah, belanja karyawan, termasuk kelompok belanja langsung, direncanakan. Pemerintah diharuskan melakukan pembayaran kepada pekerja dalam bentuk honorer sebagai imbalan atas bantuan mereka dalam memajukan kegiatan atau inisiatif tertentu.

2. Belanja atau Pengeluaran Barang dan Jasa

Yang termasuk kedalam kelompok pembelian barang dan jasa yakni pengeluaran untuk pembelian bahan habis pakai, gaji karyawan, premi asuransi, perawatan kendaraan bermotor, percetakan/duplikasi, sewa gedung perkantoran, sewa fasilitas mobilitas, penyewaan alat berat, penyewaan peralatan dan perlengkapan kantor, makanan dan minuman, pakaian dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan resmi untuk memindahkan tugas.

3. Investasi Modal

Pembelian atau pengadaan suatu pembangunan asset tetap yang berwujud yang memberikan nilai manfaat kepada negara lebih dari satu tahun yang dikemudian hari dapat digunakan untuk kegiatan

keperintahan. Asset tetap yang berwujud ini dapat berupa tanah, peralatan, mesin, bangunan, jalan, jaringan dan irigasi, dan yang termasuk kedalam aktiva tetap lainnya..

Instrumen yang menjamin terbentuknya ketertiban dalam prosedur pengambilan kebijakan perpajakan dan belanja daerah adalah APBD. Penciptaan anggaran, termasuk pendapatan dan pengeluaran, harus mempertimbangkan disiplin anggaran, serta aturan atau prinsip yang menjadi dasarnya. Oleh karena itu, pemerintah daerah harus mematuhi proses prosedural yang telah ditetapkan saat membuat anggaran pendapatan dan belanja daerah.(Yuliasati K,2019)

H. Kebijakan Pengeluaran Daerah

Bagian kebijakan umum APBD yang merupakan bagian dari dokumen perencanaan daerah memuat ringkasan kebijakan belanja daerah. Kebijakan belanja daerah merupakan salah satu elemen krusial yang secara konsisten ditekankan dalam makalah perencanaan daerah. Secara khusus memuat strategi belanja daerah adalah dokumen perencanaan daerah sebagai berikut:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Strategi pemerintah daerah, kebijakan umum, arah kebijakan keuangan daerah, dan inisiatif SKPD lintas daerah yang mencakup tindakan yang berada di bawah lingkup kerangka peraturan dan kerangka keuangan.

2. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

- a. Target Pembangunan Daerah
- b. Struktur kerja makro ekonomi regional awal.
- c. Tujuan Kebijakan Keuangan Daerah
- d. Proyek SKPD yang menjangkau SKPD, daerah, dan lintas daerah serta memasukkan inisiatif dalam kerangka anggaran dan peraturan.

3. Kebijakan Umum APBD (KUA).

- a. Tujuan perolehan kemampuan yang diukur dari agenda yang akan dilaksanakan pemerintah daerah.
- b. Memperlihatkan penerimaan suatu daerah, distribusi pengeluaran daerah, sumber dan penggunaan pendanaan, dan asumsi dasar
- c. Struktur ekonomi makro dan konsekuensinya kepada sumber pendanaan.

- d. Asumsi kebijakan anggaran dengan mempertimbangkan tren makro ekonomi dan pergeseran prinsip kebijakan fiskal pemerintah.

Rencana pembangunan daerah yang terdiri dari tujuan, sasaran kebijakan, dan strategi pembangunan daerah dalam jangka waktu lima tahun, dikembangkan lebih lanjut oleh Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pengeluaran pemerintah daerah direpresentasikan di tingkat provinsi/daerah/kota dalam anggaran pendapatan daerah, yang meliputi pendapatan, pengeluaran, dan pembiayaan. Perbedaan antara pengeluaran pembiayaan dan pengeluaran adalah bahwa pengeluaran pembiayaan melibatkan belanja barang atau jasa yang menggunakan uang dari kas umum daerah yang pada akhirnya akan diganti, sementara itu belanja yang melibatkan penggunaan uang dari kas umum negara / daerah yang tidak akan diganti..

Setelah anggaran disetujui oleh pemerintah, presiden adalah satu-satunya yang dapat melakukan pengeluaran sesuai dengan dana yang dialokasikan. Menurut Peacock dan Wiseman yang mengaku bahwa pemerintah selalu berupaya meningkatkan belanja dengan mengandalkan penerimaan pajak, pemerintah harus mendanai pengeluarannya yang meningkat untuk mendukung program dan kegiatan pembangunan berkelanjutan. Pengeluaran pemerintah meningkat sebagai akibat dari meningkatnya pendapatan pajak. (Luciana L. Nahumuri, 2019)

KESIMPULAN DAN SARAN

Dalam kebijakan fiscal terdapat salah satu komponen yakni pengeluaran pemerintah, yang merupakan tindakan..yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengendalikan bagaimana perekonomian berkembang dengan memutuskan berapa banyak uang yang akan diambil dan dibelanjakan pemerintah setiap tahun seperti yang ditunjukkan dalam makalah APBN dan APBD. Tujuan atau rencana yang dimiliki pemerintah untuk mencapainya merupakan variabel yang dapat mempengaruhi pengeluaran karena belanja dapat mengendalikan suatu tindakan yang telah direncanakan dengan cara yang diinginkan pemerintah.

Aktivitas pengeluaran yang berkaitan langsung seperti pengeluaran berupa belanja barang, gaji, modal yang dikelompokkan terhadap pengeluaran yang digunakan sebagai penyajian atau pemberitahuan belanja di suatu pemerintah secara langsung, sementara itu pengeluaran dengan aktivitas seperti penambahan pendapatan karyawan yang disajikan secara tidak langsung di dalam anggaran belanja daerah. Anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dapat berupa penerimaan, belanja, serta pembiayaan yang mencerminkan pengeluaran pemerintah di setiap daerah. Ada perbedaan antara pengeluaran pembiayaan dan

pengeluaran yang berupa, jika pengeluaran pembiayaan yang digunakan dari kas daerah yang nantinya akan di kembalikan atau diganti, sementara itu pengeluaran yang memakai kas daerah tidak perlu dikembalikan.

Demikianlah artikel ini penulis buat. Semoga bermanfaat bagi pembaca, dalam artikel ini tentunya ada banyak sekali koreksi dari pembaca, karena penulis menyadari bahwa artikel ini jauh dari kata sempurna. Maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pada pembaca yang dengan itu semua penulis harapkan artikel ini akan menjadi lebih baik lagi.

DAFTAR REFERENSI

- Amin, Fadillah. 2019. *Penganggaran Di Pemerintah Daerah*. Malang: UB Press
- Anggara, Sahya. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: CV PUSTAKA SETIA
- Anugra, Ranifial, Taufiq Marwa, and Imelda. 2016. "Analisis Hubungan Antara Pengeluaran Pemerintah Dengan Ketimpangan Distribusi Pendapatan Di Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ekonomi Pembangunan* 14, no. 1
- Djadjuli, R Didi. 2018. "Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah." *Jurnal Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara* 5, no. 2
- Harry A. P. Sitaniapessy. 2013. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap PDRB Dan PAD." *Jurnal Economia* 9, no. 1
- Irawati Bawinti, George M.V.Kawung, Antonius Y. Luntungan. 2018. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Kepulauan Talaud." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 18, no. 04
- Jaelani, Aan. 2018. *Keuangan Publik; Analisis Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam. Africa's Potential for the Ecological Intensification of Agriculture*
- Jubir, Juwandariah, Muhammad Iqbal, Rahmad Solling Hamid, and Goso Goso. 2023. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Dan Investasi Swasta Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kabupaten Luwu." *Jesya* 6, no. 1
- K, Yuliaswati. 2019. "Urgensi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (Apbd) Terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah." *Jurnal Katalogis* 5
- Nahumuri, Luciana L. 2019. "Esensi Dan Urgensi Pengeluaran Pemerintah Untuk Pembangunan Daerah." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Suara Khatulistiwa* 4, no. 1
- Nawair, Ridwan dan Ihsan Suciawan. 2021. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
- Safitri, Intan. 2016. "Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM)* 1, no. 1

- Sobandi, B. 2004. "Kebijakan Pengeluaran Pemerintah: Antara Pertumbuhan Ekonomi Dan Pemerataan." *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu ...* 1, no. 3
- Solikin, Akhmad. 2018. "Pengeluaran Pemerintah Dan Perkembangan Perekonomian (Hukum Wagner) Di Negara Sedang Berkembang: Tinjauan Sistematis." *Info Artha* 2, no. 1
- Ujiyanto, Srie Hartutie Moehaditoyo dan H.M.Amin. 2017. *Keuangan Negara*. Yogyakarta: Indomedia Pustaka